ABSTRAK

Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan aparatur sekaligus menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Kebijakan ini berdampak terhadap komposisi pegawai, pembagian kerja, kapasitas organisasi, pelayanan publik, serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pengangkatan PPPK memberikan dampak terhadap struktur birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan mengetahui kendala yang muncul dalam proses integrasinya ke dalam sistem birokrasi daerah. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan William N. Dunn (2018) dengan tiga dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK memberikan dampak positif terhadap struktur birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe, terutama dalam memenuhi kebutuhan aparatur dan meningkatkan kapasitas organisasi pada sektor yang mengalami kekurangan pegawai. Kebijakan ini juga memberikan kepastian status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan dan penghasilan pegawai, serta mendukung pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, integrasi PPPK belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian distribusi pegawai, *overstaffing*, keterbatasan pengembangan kompetensi dan karier, serta meningkatnya beban fiskal daerah.

Kata kunci: Kebijakan, PPPK, Struktur Birokrasi

ABSTRACT

The policy of appointing Government Employees with Employment Agreements (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) is one of the government's efforts to meet the need for human resources while addressing the issue of non-ASN personnel. This policy has an impact on employee composition, division of work, organizational capacity, public services, and regional fiscal capacity. Therefore, this study is important to examine the extent to which the appointment of PPPK affects the bureaucratic structure of the Lhokseumawe City Government and to identify the challenges that arise in the process of integrating PPPK into the local bureaucratic system. This study uses William N. Dunn's (2018) policy analysis theory with three dimensions: effectiveness, efficiency, and responsiveness. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis uses the Miles, Huberman, and Saldaña model, consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The results show that the PPPK appointment policy has a positive impact on the bureaucratic structure of the Lhokseumawe City Government, particularly in meeting personnel needs and increasing organizational capacity in sectors experiencing staff shortages. The policy also provides greater employment status certainty, improved employee welfare and income, and supports public services, particularly in the education and health sectors. However, the integration of PPPK has not been fully optimal due to discrepancies in employee distribution, overstaffing, limited competency and career development, and increasing fiscal burdens on the local government.

Keywords: *Policy, PPPK, Bureaucratic Structural*